

PEMBIAYAAN NONFORMAL USAHA PERIKANAN TANGKAP: KASUS MUNCAR DAN BITUNG

NONFORMAL FINANCING FOR CAPTURE FISHERIES: MUNCAR AND BITUNG CASE STUDIES

Masyhuri

Pusat Penelitian Ekonomi (P2E-LIPI)

E-mail: masyhuri_lipi@yahoo.com

Abstract

This article aims at addressing how important is the role of nonformal financing institution in the Muncar and Bitung small scale fishery. As well as fishing in other areas in Indonesia, fishing effort in Muncar and Bitung is a type of capital-intensive businesses. From the aspect of marketing, the small scale fishery of these areas has reached the commercial stage. However, fishery business conducted is still speculation, although their income outline could have been predicted. The role of "Bos" in nonformal financing is an important aspect for the fishermen of these areas. The formal financing institution still do not assist fishermen to obtain their financial needs. The "Bos" can be an individual agent or entrepreneur from various type financial activities who provide not only credit but also many kind of stimulus. This institution is always needed and necessary as far as no other financing institution for fisherman.

Keywords: *Financing, Fisherman, Capture fisheries.*

Abstrak

Artikel ini mengetengahkan pentingnya peran pembiayaan nonformal pada usaha perikanan tangkap nelayan Muncar dan Bitung. Seperti halnya usaha perikanan tangkap di daerah lainnya di Indonesia, usaha penangkapan ikan rakyat di Muncar dan Bitung juga merupakan usaha padat modal. Dari aspek pemasaran, usaha penangkapan ikan rakyat di ke dua daerah ini telah berkembang pada tataran komersial. Pendapatan nelayan sedikit banyak sudah dapat diprediksikan, meskipun usaha penangkapan ikan yang ada masih bersifat spekulatif. Peran "Bos" sangat penting dalam pembiayaan nelayan skala kecil selama lembaga-lembaga pembiayaan formal masih enggan dan belum menjangkau nelayan. "Bos" adalah individu atau perusahaan finansial yang bergerak dibidang usaha perikanan tangkap, dan tetap diperlukan sejauh belum ada institusi lain sebagai penggantinya.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Nelayan, Perikanan Tangkap*

PENDAHULUAN

Muncar terletak di Kabupaten Banyuwangi, di daerah paling timur Propinsi Jawa Timur, berbatasan dengan Propinsi Bali. Karakteristik umum usaha perikanan tangkap di daerah ini cukup unik. Muncar terkenal sebagai pusat pendaratan ikan lemuru, hasil penangkapan nelayan terutama dari perairan Selat Bali. Meskipun berbagai jenis ikan lainnya didaratkan pula di daerah ini, lemuru merupakan ikan yang paling dominan. Tidak adanya ikan lemuru hampir-hampir identik dengan musim *paceklik* ikan, dan demikian sebaliknya. Ikan lemuru adalah jenis ikan palagis, yakni ikan permukaan yang berukuran kecil, yang setiap tahunnya

muncul di perairan Selat Bali sekitar bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Seperti halnya Muncar, Bitung juga merupakan salah satu pusat penangkapan ikan di wilayah Indonesia bagian timur. Terletak di ujung utara pulau Sulawesi, Bitung terkenal sebagai tempat pendaratan ikan permukaan (palagis). Berbeda dengan Muncar yang didominasi oleh ikan palagis kecil, ikan yang didaratkan di Bitung lebih didominasi oleh ikan palagis besar, terutama ikan tuna, tongkol, dan cakalang. Ekonomi nelayan yang setiap saat melemah akibat *paceklik* ikan dan ketergantungan kepada jenis ikan tertentu, seperti ikan lemuru untuk nelayan di Muncar, hampir-hampir tidak pernah terjadi pada

nelayan dan usaha perikanan tangkap di Bitung. Berbagai jenis ikan yang dapat dihasilkan dalam jumlah yang besar dari wilayah perairan ini dan yang masing-masing mempunyai nilai ekonomi yang tinggi memungkinkan terhindarnya nelayan dari *paceklik* ikan. Suatu saat, nelayan dapat menangkap ikan tongkol dalam jumlah yang besar. Di saat yang lain, ketika ikan tongkol tidak ada, nelayan disibukkan dengan penangkapan ikan tengiri, atau ikan tuna, demikian seterusnya secara silih berganti.

Usaha penangkapan ikan pelagis lemuru di Muncar mirip dengan usaha penangkapan ikan *rengis* di Prigi, Trenggalek. Ikan *rengis* adalah ikan permukaan, sejenis ikan tongkol, tetapi berukuran kecil. Ikan lemuru berukuran lebih kecil dari ikan *rengis*. Sementara usaha penangkapan ikan palagis di Bitung mirip dengan usaha penangkapan ikan palagis di Karangsong, daerah Indramayu. Penangkapan ikan lemuru di Muncar, sebagaimana yang ada di Prigi, dilakukan dengan kapal nelayan yang disebut *slerek*, dan dengan jaring *purse seine*. Baik penangkapan ikan di Muncar maupun di Prigi adalah *one day fishing*. Nelayan melaut sore hari, dan mendarat di pagi hari berikutnya. Atau, nelayan melaut di pagi hari dan pada hari itu pula nelayan mendarat. Semakin cepat mereka mendapatkan tangkapan ikan sebanyak yang ditargetkan, semakin cepat mereka mendarat. Bedanya, di Prigi, penangkapan ikan di lakukan dengan jaring mini *purse seine*, penangkapan ikan di Muncar dilakukan dengan jaring *purse seine*. Kapal nelayan *slerek* di Muncar berukuran sedikit lebih besar dibandingkan dengan kapal *slerek* yang ada di Prigi. ABK per unit *slerek* di Muncar berjumlah antara 40 sampai 50 orang. Di Prigi, jumlah tersebut hanya 25 sampai dengan 35 orang.¹ Jaring *purse seine* yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan mini *purse seine* merupakan faktor penting perbedaan jumlah ABK per unit *slerek* di ke dua daerah tersebut. Di Bitung, penangkapan ikan dilakukan terutama dengan perahu kapal nelayan yang disebut *pajeko* dengan jaring mini *perse seine* atau *pool and line*, dan dengan kapal nelayan *pamboot* dengan alat tangkap pancing.

¹ Wawancara bebas dengan sejumlah nelayan yang dilakukan di Muncar.

Seperti halnya penangkapan ikan di daerah-daerah lainnya di Indonesia, usaha penangkapan ikan yang ada di Muncar dan di Bitung merupakan jenis usaha yang padat modal. Harga kapal nelayan *slerek*, yakni kapal nelayan yang paling dominan di Muncar yang menggunakan jaring *purse seine* lengkap tidak kurang dari Rp1,5 miliar. Sedangkan sebuah kapal *pajeko* atau *pamboot* di Bitung lengkap masing-masing tidak kurang dari Rp500 sampai Rp800 juta. Sementara masalah permodalan, terutama modal untuk investasi, masih merupakan masalah besar bagi nelayan pada umumnya. Pola umum pembiayaan usaha perikanan tangkap di Indonesia adalah pembiayaan nonformal, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank. Apakah pola umum ini terjadi pula pada usaha perikanan tangkap di Muncar dan di Bitung?

Lembaga perbankan umumnya tidak atau kurang berminat untuk menyalurkan kredit kepada nelayan sub sektor perikanan tangkap. Nelayan dalam hal ini dipandang tidak akan mampu membayar kredit yang mereka terima secara teratur, sementara pihak perbankan memerlukan kepastian keteraturan angsuran dana yang dipinjamkan. Karena itu, pola pembiayaan untuk usaha perikanan tangkap di Indonesia umumnya bersumber dari lembaga keuangan non bank. Pertanyaannya sekali lagi adalah apakah peran pembiayaan nonformal atau non bank di Muncar dan di Bitung juga dominan sebagaimana yang terjadi pada usaha penangkapan ikan yang ada di daerah-daerah lain di Indonesia? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan pokok dari makalah ini, dan ditempatkan sebagai tema utama diskusi. Dengan sendirinya, makalah ini bertujuan untuk melakukan verifikasi atau falsifikasi terhadap pola umum pembiayaan nonformal yang lazim terjadi pada nelayan Indonesia. Apakah nelayan di Muncar dan di Bitung menunjukkan kekhususan, sehingga pola pembiayaan berbeda dengan pola pembiayaan nelayan pada umumnya? Metodologi yang digunakan untuk memahami permasalahannya adalah metode perbandingan. Dengan ini, diharapkan persamaan atau perbedaan yang ada dapat diungkapkan. Sementara narasi untuk merekonstruksi realitas yang ada digunakan metode deskriptif analitis.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan sebelum ini, diketahui bahwa pembiayaan nonformal memang merupakan institusi penting yang mempunyai peran besar di bidang investasi pada usaha perikanan tangkap.² Diduga keras, pola pembiayaan usaha perikanan tangkap di Muncar dan di Bitung juga didominasi oleh pembiayaan nonformal. Pemahaman terhadap pola pembiayaan nelayan seperti yang ada di Muncar dan di Bitung jelas masih diperlukan dan akan bermanfaat sebagai landasan untuk pengembangan pembiayaan nelayan. Di sinilah arti pentingnya dari kajian tentang hal tersebut di ke dua daerah ini. Adapun data yang digunakan terutama adalah data hasil penelitian lapangan di kedua daerah tersebut, yang diadakan masing-masing pada bulan Mei dan bulan September 2014. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai penerbitan yang relevan.

Pembiayaan Pemerintah Untuk Perikanan Tangkap

Pengucuran kredit oleh lembaga perbankan kepada nelayan atau kepada sub sektor perikanan tangkap bukannya tidak pernah ada, bahkan sering dilakukan, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada masa Indonesia merdeka. Hanya saja penyaluran kredit seperti itu lebih banyak diperuntukkan kepada perikanan tambak. Sementara untuk perikanan tangkap, bila ada, jumlahnya sangat terbatas. Pada tahun 1910 misalnya, jumlah kredit yang disalurkan *Volkscredietwezen* (BRI sekarang) kepada sektor perikanan hanya 1,9 % dari seluruh kredit yang disalurkan lembaga tersebut yang jumlahnya pada tahun itu mencapai 8.849.192 gulden. Jumlah kredit ini ternyata terus mengalami penurunan, yang sampai tahun 1930 turun menjadi 0,83 %. Secara nominal, jumlah kredit untuk perikanan memang mengalami kenaikan, yang pada tahun 1930 telah mencapai 603.300 gulden, namun jumlah tersebut sebagian besar masih disalurkan untuk perikanan tambak (Masyhuri, 2014). Alasannya mudah ditebak. Pendapatan nelayan tambak lebih teratur, lebih mudah dikontrol, dan nelayan tambak mampu memberi agunan untuk

² Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah serangkaian penelitian tentang pembiayaan perikanan tangkap yang dilakukan di sejumlah daerah oleh P2E-LIPI antara tahun 2011 dan 2013. Beberapa diantaranya telah diterbitkan. Lihat Thoha, 2013; Nadjib, 2013; Masyhuri, 2013; 2014.

pinjaman mereka, dengan lahan tambak misalnya. Karena itulah, kredit yang disalurkan untuk usaha perikanan tangkap selalu kecil jumlahnya.

Pada masa Indonesia merdeka, yakni pada awal pelaksanaan program Bimbingan Massal (Bimas), nelayan pernah mendapatkan pinjaman dari Pemerintah melalui program Bimas. Penyaluran kredit yang dilaksanakan saat itu merupakan tahun pertama untuk subsektor perikanan tangkap, tetapi penyaluran kredit ini sekaligus juga merupakan penyaluran kredit yang terakhir. Kredit Bimas nelayan tersebut dianggap gagal, dan sesudah itu perbankan tidak lagi “berani” menyalurkan kredit untuk nelayan perikanan tangkap. Dibandingkan dengan kredit perbankan yang disalurkan pada sektor pertanian, usaha perikanan tangkap seakan-akan dianaktirikan. Dalam tahun 2011 misalnya, BRI telah menyalurkan kredit sektor perikanan sebanyak 1,5 triliun rupiah. Kredit tersebut disalurkan dalam bentuk kredit komersial, kredit usaha rakyat, kredit ketahanan pangan perikanan, serta program lainnya. Sebagaimana masa-masa sebelumnya, kredit BRI ini disalurkan terutama ke usaha budidaya tambak, khususnya tambak udang (“BRI Beri...”, 2012).

Keengganan bank menyalurkan kredit pada usaha penangkapan ikan menjadikan pola pembiayaan untuk usaha perikanan tangkap di Indonesia umumnya bersumber dari lembaga keuangan nonbank. Pada tataran paling depan, yang akrab dengan kehidupan nelayan, adalah pola pembiayaan nonformal yang berasal dari modal perorangan dan dari para rentenir atau pelepas uang. Modal perorangan berasal terutama dari pengusaha-pengusaha perikanan, seperti pengusaha pengolahan ikan, pedagang ikan yang sukses yang memperdagangkan ikan segar antar daerah. Mereka biasanya berperan penting sebagai sumber modal untuk investasi. Rentenir atau pelepas uang umumnya adalah pedagang pengepul atau pedagang *langgan*. Mereka berperan penting sebagai sumber modal, khususnya modal kerja. Rentenir tersebut mempunyai konotasi negatif, yang dianalogkan dengan penghisap darah atau lintah darat. Meskipun demikian, pembiayaan nonformal seperti itu sangat dominan pada usaha perikanan tangkap, tidak saja pada saat sekarang ini, tetapi juga sudah berlangsung sejak lama.

Setidak-tidaknya, pola pembiayaan nonformal yang dimaksud telah mengemuka sejak pertengahan pertama abad ke-19, yakni ketika terjadi aliansi antara *pachter* (penyewa) dan pemerintah. Pada saat itu, polarisasi kekuasaan politik masih cukup tajam, dan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan dana dari sektor perpajakan masih terbatas. Keadaan seperti ini memaksa pemerintah menyewakan hak penarikan pajak yang dimaksud kepada pihak ke tiga, melakukan kompromi atau mengadakan aliansi dengan para penyewa, yakni dengan para *pachter* (Masyhuri, 1996). Sistem sewa seperti ini tidak hanya diterapkan dibidang penangkapan ikan saja, tetapi juga di bidang-bidang usaha lainnya (Butcher J and H. Dick, 1993). Sistem sewa subsektor perikanan tangkap diterapkan di daerah Banten, Pekalongan, Semarang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan daerah-daerah Jawa lainnya serta beberapa daerah di luar Jawa, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah (Masyhuri, 1996). Dalam konteks usaha perikanan tangkap di Kepulauan abad ke-19, para *pachter* merupakan penggerak tumbuh berkembangnya usaha penangkapan ikan saat itu (Masyhuri, 1996).

Ketika birokrasi pemerintahan kolonial telah berkembang dan pemerintah mampu menarik pajak secara langsung, sistem sewa secara berangsur dihapuskan diganti dengan sistem pajak kepala, pajak pendapatan, dan sebagainya. Sistem sewa pada usaha perikanan tangkap sendiri dihapus, dan sejak itu investasi untuk perikanan tangkap dari para *pachter* bisa dikatakan telah berhenti. Padahal, institusi lain sebagai pengganti tidak atau belum ada. Sejalan dengan hilangnya peran *pachter* sebagai institusi pembiayaan usaha penangkapan ikan, serta belum adanya institusi pengganti, maka *rentenir* (pelepas uang/lintah darat) memperoleh momentumnya muncul sebagai institusi penyedia modal yang mendominasi usaha perikanan tangkapa. Peran para *rentenir* tersebut tampak masih tetap dominan sampai saat ini. Sejak semakin menonjolnya peran *rentenir* di bidang perikanan tangkap, maka sejak itu pula telah terpola peran pembiayaan nonformal pada usaha perikanan tangkap (Masyhuri, 2014).

Modernisasi usaha penangkapan ikan oleh Pemerintah melalui kerja sama atau *joint*

venture digalakkan pula. Hanya saja program modernisasi tersebut mendorong munculnya dualisme ekonomi pada usaha penangkapan ikan di Indonesia (Bailey, 1988). Modernisasi yang dimaksud lebih banyak menyentuh usaha penangkapan ikan skala besar daripada usaha penangkapan ikan rakyat berskala kecil. Dengan diluncurkannya program modernisasi sektor perikanan, jumlah kapal perusahaan penangkapan ikan sampai tahun 1996 telah bertambah menjadi 4.396 unit, yakni meningkat sebesar 134% bila dibandingkan dengan jumlah kapal pada tahun 1992 (Dirjen Perikanan Tangkap, 1997). Kapal-kapal tersebut umumnya merupakan milik perusahaan *joint venture* yang memang secara gencar dalam periode-periode itu dipromosikan oleh pemerintah.

Program yang paling akhir diluncurkan oleh pemerintah untuk mendorong sektor perikanan tangkap adalah program bantuan 1000 unit kapal nelayan berukuran 30 GT. Program tersebut digulirkan mulai tahun 2011, sebagai program modernisasi terhadap perikanan tangkap skala kecil. Diharapkan, program ini telah diselesaikan semuanya pada tahun 2014. Program tersebut tampaknya kurang efektif, dan lebih banyak mubazir. Dimana-mana, kapal-kapal Inkamina, nama kapal dari program tersebut, tidak atau belum beroperasi. Di Prigi, di Cilacap, di Muncar, di Juana, dan sejumlah tempat lain ditemukan kapal-kapal tersebut tidak beroperasi. Hanya di sejumlah daerah, kapal tersebut dapat dioperasikan, misalnya di Karangsong, setelah melalui proses modifikasi atau penyesuaian dengan kebiasaan atau keinginan nelayan setempat. Faktor penting tidak beropersasinya kapal Inkamina diantaranya adalah bentuk, ukuran, dan jaring yang digunakan kurang mendukung atau kurang sesuai dengan kebiasaan nelayan, serta besarnya modal operasional yang dibutuhkannya. Realitas ini menjadi alasan dilakukannya evaluasi terhadap program bantuan 1000 kapal tersebut. Program yang dimaksud pada akhirnya dihentikan ditengah jalan. Tampaknya, keaneragaman usaha dan tradisi dari masyarakat nelayan setempat perlu mendapat perhatian besar dalam pelaksanaan program pembiayaan. Bila tidak, hal ini dapat menjadi faktor penting kegagalan program-program pembiayaan yang dilakukan.

Nelayan *Slerek*, *Soma Pamboot*, Dan Investasi Perikanan Tangkap

Sebagaimana pemahaman yang ada selama ini, armada penangkapan ikan yang berukuran besar, yang berukuran lebih dari 5 sampai 100 GT, disebut kapal nelayan. Sedangkan yang berukuran kurang dari 5 GT disebut perahu nelayan. *Longline* yakni kapal nelayan yang digunakan untuk menangkap ikan tuna di lepas pantai yang berukuran jauh lebih besar dari kapal nelayan pada umumnya dikategorikan kedalam kapal perusahaan. Sistem gaji diterapkan untuk ABK *longline*, sementara sistem bagi hasil umumnya berlaku sebagai ganti sistem upah pada perahu dan kapal nelayan. Sejauh ini, belum pernah diketemukan sistem upah di terapkan untuk perahu ataupun kapal nelayan. Berdasarkan kategori tersebut, kapal nelayan tradisional yang dominan di Muncar dan di Bitung masing- masing adalah kapal nelayan *slerek*, dan kapal nelayan *soma* dan *pamboot*. Selain kapal nelayan, di Bitung terdapat pula kapal-kapal perusahaan penangkapan dan pengolahan ikan yang berpangkalan di tempat itu. Sementara di Muncar, tidak diketemukan kapal-kapal seperti itu.

Bisa dikatakan bahwa *slerek* merupakan kapal nelayan tradisional terbesar yang ada di Muncar, dan hampir-hampir tidak ada kapal nelayan jenis lain di tempat ini. Suatu saat memang terdapat juga kapal nelayan yang cukup besar yang sandar, khususnya kapal nelayan *payang* dari Pasuruhan. Sebagaimana *slerek* di Prigi, *slerek* di Muncar berukuran antara 20 sampai 30 GT. Seperti kapal nelayan *slerek* di Muncar, *Soma* dan *Pamboot* juga merupakan perahu nelayan tradisional terbesar yang ada di daerah Bitung. *Soma* adalah jenis kapal nelayan berukuran sekitar 15 GT, dioperasikan dengan menggunakan jaring mini *purse seine*, yang digunakan untuk menangkap ikan palagis, yang oleh nelayan setempat jaring tersebut disebut dengan *pajeko*. Karena itu, kapal nelayan *soma* disebut juga dengan sebutan *soma pajeko*. *Pamboot* merupakan jenis kapal nelayan jenis lain, yang berukuran sekitar 15 GT pula. Kapal ini digunakan untuk menangkap ikan palagis jenis tuna dengan menggunakan alat tangkap *pancing ulur*.

Sebenarnya, di Muncar dan di Bitung diketemukan berbagai armada nelayan berbagai

ukuran yang lebih kecil. Perbedaan menyolok yang diketemukan di ke dua daerah tersebut, sebagaimana disinggung di atas, adalah keberadaan industri penangkapan ikan. Bila di Muncar seluruh armada penangkapan ikan terdiri dari armada penangkapan ikan tradisional, di Bitung tidak demikian. Armada penangkapan ikan di daerah ini dapat dikelompokkan secara tegas antara perikanan tangkap tradisional dan perikanan tangkap modern.³ Kapal-kapak penangkap ikan sektor modern berukuran jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal nelayan yang ada. Kapal-kapal ini berukuran 800 GT ke atas. Tidak saja kapal-kapal nelayan miliki pengusaha Indonesia, kapal-kapal tersebut juga kapal-kapal asing yang mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan pengolahan ikan setempat.⁴

Sebagaimana disebutkan, kapal nelayan *slerek* di Muncar berukuran antara 20 sampai 30 GT, sedikit lebih besar bila dibandingkan dengan kapal nelayan *slerek* yang ada di Prigi, pantai selatan Jawa Timur. Ada persamaan yang sangat dekat antara kapal nelayan *slerek* yang ada di Muncar dan kapal nelayan *slerek* yang ada di Prigi. Tidak hanya bentuk kapalnya, tetapi juga sistem atau cara kerja dalam penangkapan ikan. Konon menurut cerita yang hidup di kalangan nelayan Muncar, *slerek* yang ada di Muncar pada mulanya adalah kapal *slerek* Prigi yang datang atau yang *andun* ke daerah Muncar. Baik kapal *slerek* yang ada di Muncar maupun yang ada di Prigi menangkap ikan palagis dengan jaring *mini purse seine*, khususnya ikan palagis kecil. Bila di Prigi ikan tongkol kecil, atau ikan *rengis*, merupakan ikan yang paling banyak di tangkap, di Muncar, ikan lemuru merupakan ikan utama yang ditangkap di daerah ini.

Sebuah organisasi penangkapan ikan dengan *slerek* terdiri dari dua unit kapal nelayan, satu unit kapal nelayan yang disebut *slerek*, atau disebut juga *golekan*, dan satu unit perahu nelayan yang berukuran kurang dari 5 GT sebagai perahu pembantu. Perahu ini di Muncar disebut perahu

³ Hasil observasi lapangan selama penelitian dilakukan di Muncar dan di Bitung.

⁴ Pada waktu penelitian lapangan dilakukan, dua unit kapal nelayan modern bersandar di pelabuhan perikanan Bitung. Menurut keterangan, kedua kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan dari Panama yang kontrak kerjanya telah habis dan akan segera kembali ke Panama

pemburu, di Prigi perahu ini disebut dengan perahu Johnson, yakni nama dari mesin yang mula-mula digunakan untuk pendorong perahu ini. Berbeda dengan perahu Johnson yang ada di Prigi, perahu *pemburu* di Muncar berukuran lebih besar bila dibandingkan dengan perahu Johnson. Pada saat ini, mesin perahu pendorong *slerek*, baik yang ada di Muncar maupun di Prigi, sebagian besar menggunakan mesin PS bekas atau mesin-mesin bekas sejenis. Fungsi perahu *pemburu* adalah untuk mengejar atau memburu keberadaan ikan yang telah dilihat oleh *panto*, petugas khusus mencari kerumunan ikan yang ada di kapal *slerek*. Dengan menarik ujung jaring mini *purse seine*, perahu *pemburu* mengejar kerumunan ikan, melingkarinya dengan jaring. Setelah ikan terkurung jaring, ujung jaring tersebut ditarik ke arah kapal *slerek*, yang selanjutnya jaring ditarik ke geladak kapal. Dengan cara demikian, ikan yang telah terkurung jaring dapat terangkat ke kapal hampir seluruhnya.

Sebagaimana *slerek*, *soma pajeko* juga berukuran tidak terlalu besar, berbobot kurang dari 20 GT. *Soma pajeko* rata-rata berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan kapal *slerek*. Sebagaimana kapal *slerek* yang ada di Muncar, *soma pajeko* menangkap ikan pelagis berukuran sedang, terutama ikan tongkol dan cakalang, dengan menggunakan jaring mini *purse seine*. *Soma pajeko* dioperasikan oleh sekitar 15 orang nelayan. Jumlah ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan nelayan *slerek* di Muncar, yang perunitnya dioperasikan oleh 30 orang lebih. Perbedaan jumlah ABK per unit kapal nelayan di ke dua daerah tersebut disebabkan oleh penggunaan *gardan*, yakni mesin penarik jaring. Bila *soma pajeko* menggunakan mesin *gardan* sebagai penarik jaring, maka kapal *slerek* yang ada di Muncar tidak menggunakan mesin *gardan*. Untuk menarik jaring mini *purse seine* yang telah diterbarkan secara manual memerlukan tenaga kerja tidak kurang dari 30 orang. Di Muncar, kapal *slerek* tidak akan melaut bila ABK nya kurang dari jumlah tersebut.

Perikanan tangkap nelayan *slerek* di Muncar dan nelayan *soma pajeko* di Bitung merupakan perikanan tangkap *one day fishing*. *Fishing ground* nelayan Muncar berada di selat Bali, dan dapat dicapai dari palabuhan Muncar sekitar

3–4 jam. Demikian juga *fishing ground* nelayan Bitung, perairan penangkapan ikan nelayan Bitung dapat dicapai skitar 3 jam pula. Dengan demikian, biaya produksi untuk kedua jenis usaha penangkapan ikan tersebut tidak terlalu besar. Perbekalan dan biaya operasional penangkapan ikan nelayan di Muncar dan di Bitung untuk sekali melaut sekitar Rp 2 juta. Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran untuk pembelian solar. Pengeluaran untuk konsumsi bukan termasuk pengeluaran yang diperhitungkan sebagai pengeluaran bersama. Masing-masing ABK umumnya membawa perbekalan mereka sendiri, untuk makan, minum, merokok, dan kebutuhan individual lainnya. Sedikit banyaknya tergantung masing-masing ABK.

Sebagaimana di tempat lain, usaha penangkapan ikan di Muncar dan di Bitung merupakan usaha padat modal, dan merupakan sektor usaha yang beresiko besar, dengan pendapatan yang tidak teratur.⁵ Selain kemungkinan tidak memperoleh tangkapan sehingga nelayan mengalami kerugian akibat terus menumpuknya hutang biaya operasional, resiko kehilangan kapal atau jaring dan lain sebagainya pada waktu penangkapan ikan adalah sangat mungkin. Pembiayaan formal, terutama kredit dari bank, kurang berperan. Bagi nelayan tradisional, akses untuk mendapatkan pinjaman dari bank sangat terbatas (Masyhuri, 2014). Secara teoretis, sektor yang mempunyai karakteristik seperti ini memang mendorong pelaku usaha untuk melakukan kerja sama dalam permodalan maupun berinvestasi. Untuk mengatasi keterbatasan modal dan memperkecil resiko kerugian yang mungkin ditanggungnya, nelayan melakukan kerja sama dalam bentuk *musyarakah* atau *syarikat* dalam pengadaan sarana produksi. Satu unit kapal nelayan dimiliki secara bersama-sama oleh sejumlah nelayan, apakah itu kepemilikan terhadap bagian tertentu dari

⁵ Untuk pengadaan satu unit lengkap perahu *kotekan* (Sumenep), perahu *gardan* (Lamongan), perahu *apung* (Bagansiapiapi), perahu *slerek* (Trenggalek), perahu *jaring apung* (Indramayu) yang berukuran antara 15 GT sampai 20 GT misalnya dibutuhkan dana antara 500 juta sampai dengan 1 milyar rupiah. Perahu-perahu nelayan yang berukuran lebih kecil sekitar 10 GT harganya juga cukup tinggi, tidak kurang dari Rp 250 juta per unitnya (Masyhuri, 2013; Masyhuri, 2014).

sarana penangkapan ikan (kepemilikan atas perahu saja, jaring saja, mesin pendorong, dan bagian-bagian lainnya), atau dalam bentuk modal bersama. Sebagai konsekuensinya, pendapatan hasil usaha yang diperoleh di dibagi sesuai dengan porsi kepemilikannya. Masing-masing bagian peralatan tangkap mendapat porsi bagian yang berbeda. Perahu mendapat porsi yang terbesar, mesin pendorong, jaring, dan peralatan lainnya mendapatkan porsi bagiannya masing-masing yang tidak sama. Pola kepemilikan kelompok seperti ini karenanya berkembang pada hampir setiap komunitas nelayan di manapun di Indonesia (Nadjib, 1993; Imron, 1998; Elfindri, 2002).

Dalam konteks perekonomian moderen, modal bersama dengan sistem bagi hasil kurang diminati. Dalam portofolio perbankan misalnya jenis pembiayaan bagi hasil hanya sebagian kecil dari pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut (Karim, 2001). Terdapat beberapa hal yang menyebabkan sistem bagi hasil kurang diminati, antara lain adanya apa yang disebut sebagai *adverse selection* dan *moral hazard*. Pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi mereka, mengambil kredit dari bank dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya lebih menguntungkan dari pada harus membagi keuntungan dengan pemodal mitra. Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah umumnya juga enggan terhadap pembiayaan bagi hasil. Kebanyakan yang memilih model bagi hasil adalah mereka yang bergerak dibidang usaha yang beresiko tinggi. Selain itu, banyak pengusaha melakukan tindakan yang tidak terpuji (*moral hazard*), seperti melakukan pembukuan ganda untuk menyembunyikan keuntungan riil yang diperoleh (Karim, 2001).

Berbeda dengan itu adalah usaha rakyat dibidang penangkapan ikan. Sistem bagi hasil di kalangan mereka merupakan sistem yang sudah berurat berakar. Suatu kenyataan yang sulit diingkari dari masyarakat nelayan, perilaku gotong royang untuk bekerja dalam pengadaan modal ataupun dalam pelaksanaan usaha (*ta'awwun*) merupakan aspek penting dalam kehidupan mereka. Tampaknya, sebagai

mana nelayan di tempat lain, aspek kerja sama ini merupakan kearifan local yang berperan penting sebagai faktor berkembangnya usaha rakyat di bidang perikanan tangkap. Tanpa aspek *ta'awwun* tersebut, sulit dibayangkan perkembangan dari usaha perikanan tangkap yang ada (Masyhuri, 2013). Sebagai akibatnya, armada nelayan perikanan tangkap umumnya merupakan armada milik kelompok, dimiliki oleh dua, tiga nelayan, dan seterusnya. Tidak kurang sebuah kapal nelayan dimiliki oleh lebih dari lima orang nelayan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sistem pemilikan kelompok atas sarana penangkapan ikan merupakan cara yang dilakukan untuk saling membantu dalam mengatasi hambatan permodalan yang hampir-hampir tidak teratasi oleh nelayan secara perorangan. Sistem kepemilikan kelompok tampaknya merupakan wahana tolong menolong atau *ta'awwun* bagi masyarakat nelayan, khususnya tolong menolong dalam pengadaan modal untuk investasi.

Tampaknya, bersyarikat dalam usaha dalam bentuk *mudhorobah* merupakan bentuk syarikat yang paling banyak ditemukan di kalangan nelayan. Dalam syarikat *mudharabah* salah satu pihak menjadi pemodal, dan pihak lainnya menjadi operatornya. Untung dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, rugi berupa uang ditanggung pemodal dan rugi berupa tenaga ditanggung operator (Karim, 2001). Pembiayaan nelayan umumnya berkisar pada aktivitas juragan darat di satu pihak dan, juragan laut serta *belah* (ABK) di pihak lain. Ketiganya membentuk kelompok usaha, yang tersusun dalam pelapisan yang hirarkhis. Sebagai kelompok, juragan darat menempati strata tertinggi, diikuti kelompok juragan laut, dan strata terendah ditempati kelompok *belah*.

Dari aspek ekonomi, juragan darat memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang lebih mapan dibandingkan dua kelompok sosial lainnya. Dengan kedudukan sosial yang lebih tinggi dan kemampuan ekonomi yang lebih baik, mereka berperan tidak saja sebagai sumber pembiayaan usaha penangkapan ikan, tetapi juga berperan sebagai “sabuk pengaman”, sebagai *patron* pada saat-saat kesempitan ekonomi (*paceklik*). Pada musim-musim seperti ini, kebutuhan hidup sehari-hari para *belah* sering dipenuhi dengan

berhutang kepada *juragan laut*, atau dengan garansi *juragan laut*, nelayan *belah* mendapatkan biaya kebutuhan hidup dari juragan darat. Semua biaya yang dikeluarkan pada saat-saat sulit diperhitungkan sebagai utang, dan dibayar pada saat hasil tangkapan ikan membaik.

Bagi sejumlah nelayan tertentu, yakni nelayan-nelayan yang mengalami kesuksesan, permodalan bukan lagi menjadi masalah, namun tidak demikian bagi nelayan pada umumnya. Secara garis besar, nelayan Indonesia setidak-tidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yakni kelompok nelayan *pre-bankable*, nelayan *bankable*, dan nelayan *post-bankable* (Thoha, 2013). Nelayan-nelayan pada tataran *pre-bankable* dengan berbagai alasannya masing-masing umumnya tidak berani atau takut berurusan dengan bank. Yang demikian ini merupakan sebab pula semakin terbatasnya akses mereka pada lembaga keuangan bank. Kelompok nelayan yang berani mengajukan pinjaman dan sebagian mendapatkan pinjaman dari bank terutama adalah nelayan-nelayan dari kategori *bankable*, meskipun jumlah mereka masih sangat terbatas. Sementara nelayan kategori *post-bankable* umumnya tidak membutuhkan lagi pinjaman dari bank. Bagi mereka, bank hanya merupakan tempat menyimpan uang. Nelayan yang berhasil mencapai tataran *post-bankable* tidak banyak jumlahnya, termasuk juga nelayan yang ada di daerah Muncar dan Bitung, sehingga dengan demikian, masalah permodalan pada umumnya masih tetap merupakan kendala bagi nelayan.

Keluarga, pengusaha pengolahan ikan, pedagang ikan, dan bahkan nelayan itu sendiri masing-masing merupakan sumber pembiayaan usaha penangkapan ikan, khususnya dalam pembiayaan pengadaan kapal atau alat penangkap ikan. Modal investasi dari mereka umumnya bersifat parsial, dalam arti modal berasal dari banyak pihak. Sejumlah kasus seperti ini dapat ditemukan hampir di semua komunitas nelayan, termasuk nelayan yang ada di Muncar dan di Bitung. Besarnya modal atau biaya investasi yang disertakan menentukan besarnya bagian dari hasil penangkapan yang diterimanya.

Pembiayaan Nonformal Nelayan Muncar

Di lingkungan nelayan Muncar dikenal apa yang disebut “bos”, sebagai sebutan untuk menunjuk kepada seseorang yang mempunyai usaha dibidang perikanan, termasuk pengelolaan minyak ikan lemuru. Seperti yang telah disampaikan, Muncar merupakan pusat pendaratan ikan lemuru hasil tangkapan terutama nelayan setempat di perairan Selat Bali. Bisa dikatakan hampir semua ikan lemuru yang didaratkan di Muncar dijual kepada pabrik-pabrik pengolahan ikan. Penjualan ikan lemuru segar untuk keperluan konsumsi sangat terbatas. Ikan lemuru termasuk ikan yang kurang disukai masyarakat sebagai lauk pauk. Oleh karena itu, pabrik-pabrik atau pusat-pusat pengelolaan ikan di Muncar berkembang dengan suburnya.

Berbagai jenis pengolahan ikan dapat ditemukan di daerah ini, yang menonjol adalah usaha pengolahan minyak ikan, penepungan ikan, pengalengan ikan, pengasinan ikan, dan pemindangan ikan. Usaha pembuatan terasi dan petis juga ada di Muncar, meskipun kurang menonjol. Pada tahun 2004 industri pengolahan minyak ikan berjumlah 14 buah, jumlah yang cukup besar untuk hanya sebuah daerah kecamatan. Jumlah industri tersebut tampaknya tidak banyak mengalami pertambahan hingga tahun 2013. Jumlah industri penepungan ikan, baik yang moderen maupun yang tradisional, pada tahun 2004 ada 35 buah. Jumlah tersebut bertambah menjadi 46 buah pada tahun 2013. Tampaknya periode antara tahun 2004 dan 2013 merupakan periode pertumbuhan lambat untuk semua industri pengelolaan ikan di Muncar, termasuk industri pengalengan ikan, pengasinan ikan, pemindangan, dan industri-industri pengolahan lainnya.

Sebagaimana di tempat-tempat lainnya di Indonesia, “bos” adalah pemilik-pemilik industri yang sukses di Muncar. Mereka berperan penting sebagai investor pada bidang usaha penangkapan ikan di daerah ini. Mereka hampir senantiasa menanamkan modal mereka pada bidang perikanan tangkap untuk menjamin kelangsungan pasokan bahan baku usaha mereka. Panggilan “bos” sangat akrab untuk mereka. Di Tanjung Pandan, Belitung, fenomena “bos” sangat menonjol pula. Sebagaimana di Muncar, mereka berperan penting sebagai investor di bidang penangkapan ikan. Berbeda dengan “bos” yang

ada di Muncar, “bos” di Belitung lebih banyak bergerak dibidang perdagangan ikan segar, atau daging ikan segar, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Sementara “Bos” di Muncar bergerak terutama dibidang pengolahan ikan.

Pada tataran empiris, tingkat kesuksesan mereka yang disebut sebagai “bos” di Muncar tidaklah sama. Diantara mereka ada yang disebut sebagai “bos besar”, ada juga yang disebut sebagai “bos kecil”. Pengusaha pengolahan minyak ikan dan pengalengan ikan di Muncar dengan sendirinya termasuk “bos besar”, sementara pedagang ikan, pengelola perusahaan terasi atau petis umumnya termasuk “bos kecil”. Diantara mereka, terdapat juga sejumlah “bos” yang mengembangkan usaha yang bergerak dibidang ekspor produksi industri pengolahan ikan Muncar. Pada tahun 2004 jumlah mereka ada 17 orang, dan tampaknya jumlah tersebut tidak mengalami penambahan maupun pengurangan sampai tahun 2013.⁶ Di Tanjung Pandan, “bos besar” berjumlah 9 orang. Mereka adalah pemilik perusahaan. Sedangkan jumlah “bos” kecil di daerah ini seluruhnya ada sekitar 60 orang.⁷

Untuk menjaga kelangsungan usaha mereka, para “bos” membangun hubungan kerja sama dengan sejumlah nelayan. Hubungan kerja yang paling dominan diantara mereka adalah hubungan kerja antara penampung dan pemasok ikan. “Bos” sebagai penampung ikan dan nelayan sebagai pemasoknya. Tidak hanya itu, “bos” dalam hal ini juga berperan sebagai penyedia modal, baik modal untuk investasi maupun modal kerja. Sementara nelayan pemasok ikan berperan sebagai penerima modal dan sebagai nelayan penangkap ikan. “Bos” dalam hal ini menjadi institusi pembiayaan usaha perikanan tangkap di Muncar. Tanpa adanya peran “bos”, nelayan Muncar jelas memerlukan institusi pengganti sebagai sumber pendanaan mereka, khususnya dana untuk investasi. Permasalahannya adalah mungkinkah peran “bos” dapat digantikan dengan institusi lain, misalnya oleh lembaga bank? Sejauh ini, sebagaimana di tempat-tempat lainnya, lembaga keuangan formal di Muncar belum bergairah untuk menyalurkan kredit kepada nelayan.

⁶ Sumber primer yang tidak diterbitkan.

⁷ Data hasil penelitian lapangan.

“Bos-bos” di Muncar meluncurkan atau membuat kapal nelayan tidak untuk di miliki sebagaimana “bos” di Tanjung Pandan. “Bos” di Tanjung Pandan, selain menjual kapal untuk nelayan setempat, juga membuat kapal untuk dimilikinya sendiri. “Bos” di Muncar membuat kapal nelayan semata-mata untuk dijual atau diutangkan kepada nelayan. Kapal-kapal tersebut dengan harga yang telah ditentukan dijual atau diserahkan kepada nelayan sebagai kredit yang pembayarannya dilakukan tidak tunai, tetapi harus dibayar sekali bayar. Meskipun seandainya nelayan mampu membayar tunai, mereka tidak bisa langsung membayarnya atau melunasinya. Transaksi jual beli sekali bayar seperti ini harus ada tenggat waktu yang lamanya tidak ditentukan. Nelayan tidak harus segera melunasi kapal nelayan yang mereka terima. Nelayan diberi kebebasan kapan saja untuk membayarnya. Tidak ada batasan waktu, dan tidak ada bunga dibebankan pada nelayan. Hanya saja selama kapal nelayan tersebut belum dibayar selama itu pula nelayan terikat kepada “bos”, harus menjual ikan hasil tangkapan mereka kepada “Bos”, dengan harga yang ditetapkan oleh “bos” sendiri. Umumnya, penetapan harga ikan oleh “bos” senantiasa lebih murah, dibawah harga pasar. “Bos” berspekulasi dan menyakini bahwa nelayan penerima kredit tidak akan mampu membayar secara tunai, kecuali setelah menabung dalam waktu yang lama. “Bos” berusaha terus mengulur waktu. Semakin lama tenggat waktu pembayaran dari nelayan, semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh “Bos”.

Melalui ikatan kerja seperti ini, kelangsungan perusahaan pengolahan atau perdagangan ikan dapat berlangsung terus. Perusahaan juga menampung ikan hasil tangkapan nelayan lain yang tidak membeli kapal kepadanya. Nelayan-nelayan seperti ini diantaranya adalah nelayan-nelayan yang telah berhasil melunasi kapal nelayan yang mereka beli secara kredit. Hubungan antara “Bos” sebagai patron dan nelayan penerima kapal sebagai klien umumnya putus. Hal ini disebabkan terutama oleh pola pembelian ikan di tempat ini bersifat oligopsoni.

Keuntungan yang diperoleh “bos” dengan praktek penjamin kapal seperti ini adalah margin antara harga pembelian ikan dari nelayan yang ditetapkan besarnya oleh “bos” sendiri dan

harga jual. Semakin lama nelayan terikat kepada “bos”, semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh oleh “bos”, dan tampaknya demikianlah yang diinginkan oleh “bos”. Pada waktu penelitian lapangan dilakukan, tidak deketemukan atau didengar cerita bahwa ada kapal tidak lagi laik laut yang belum terbayar lunas.

Spekulasi “bos” tentang kemampuan nelayan membayar kredit kapal nelayan yang diterimanya mendekati kebenaran. Umumnya nelayan baru membayar hutangnya setelah mengoperasikan kapal yang diterimanya dalam waktu yang cukup lama, menabung sedikit demi sedikit dari hasil yang diperolehnya dari usaha tersebut. Setelah terkumpul sebanyak harga kapal, nelayan baru membayarnya dengan sekali bayar. Pada waktu penelitian lapangan dilakukan, terungkap informasi bahwa waktu pelunasan kapal nelayan umumnya terjadi tidak kurang dari 15 tahun. Sistem bayar keseluruhan harga kapal sekali gus merupakan cara tersendiri untuk mengikat nelayan selama mungkin. Bila kapal terbayar lunas, nelayan baru dapat menjual ikan hasil tangkapannya kepada siapa saja yang membeli dengan harga yang lebih baik.

Sebagaimana dengan “bos” di Muncar, peran “bos” di Tanjung Pandan, daerah Belitung, sangat dominan pula dalam pembiayaan usaha perikanan. Para “bos” dengan modal yang dimilikinya membuat kapal, dan kapal-kapal tersebut, bila laku, dijual kepada nelayan. Bila tidak terjual, kapal tersebut tetap milik “bos” yang dioperasikan oleh nelayan yang bekerja pada mereka. Dengan kata lain, kapal-kapal tersebut dipercayakan kepada nelayan untuk menangkap ikan. Mereka hanya berstatus sebagai pengelola. Sejumlah nelayan yang diwawancarai menegaskan bahwa mereka tidak mau membeli kapal dengan alasan lebih enak sebagai pengelola saja, tidak ada beban dan tanggung jawab. Nelayan yang berstatus sebagai nelayan pembeli kapal, umumnya membayar dengan cara angsuran, di bayar setiap saat apabila mereka memiliki uang. Nelayan tidak dibatasi berapa lama utang mereka harus lunas, dan tidak ada batas besaran angsuran yang harus diserahkan setiap mengangsur. Semakin besar angsurannya dan semakin sering, tentunya semakin cepat pula kapal nelayan tersebut akan terbayar lunas. Disinilah letak perbedaan peran

“bos” yang ada di Muncar dan “bos” yang ada di Tanjung Pandan.

Yang menarik kerja sama antara “bos” dan nelayan seperti ini, baik yang terjadi di Muncar atau di Tanjung Pandan, adalah bahwa ikan hasil tangkapan kapal nelayan merupakan hak nelayan sepenuhnya. Berdasarkan sistim bagi hasil yang berlaku di kedua daerah ini, “Bos” tidak mendapat bagian sedikitpun dari ikan hasil tangkapan. Semua hasil tangkapan adalah hak nelayan, dikeluarkan untuk membayar biaya perbekalan, dan sisanya di jual kepada “bos”, dan hasilnya dibagi diantara mereka sesuai dengan sistim bagi hasil yang berlaku. Tampaknya, para “bos” sudah puas dengan keuntungan yang didapatnya dari selisih harga beli dari nelayan dan harga pasar, dan selisih itu tampaknya memang cukup besar. Sebagai contoh, harga ikan tahun 2013 yang dipatok oleh “bos” sebesar sekitar Rp3000,- sampai dengan Rp5000,- tergantung jenis ikannya. Harga tersebut berlaku untuk nelayan yang belum lunas kredit kapal yang dibebankan pada mereka. Apabila kapal nelayan tersebut telah terbayar lunas dan menjadi milik nelayan, harga ikan hasil tangkapannya melonjak cukup drastis, yang pada tahun itu termurah di beli “bos” dengan harga sekitar Rp. 18.000,- per kg.

Praktek perkreditan kapal nelayan di Muncar sebagaimana diuraikan di atas tampaknya merupakan faktor penting penyebab lambatnya pertambahan kapal nelayan di daerah ini. Kesulitan untuk membayar harga kapal secara sekali gus yang dihadapi oleh nelayan merupakan faktor penghambat yang serius. Investasi untuk usaha perikanan tangkap di daerah ini terbatas jumlahnya. Berbeda dengan ini adalah nelayan Tanjung Pandan. Motivasi yang terbangun di kalangan nelayan di tempat ini adalah secepatnya kapal terbayar lunas, sehingga mereka akan mendapatkan harga ikan yang “wajar” dari “bos”. Secara umum dari aspek pembiayaan, usaha perikanan tangkap di Muncar sudah sampai pada tahap komersial. Meskipun usaha perikanan tangkap yang dilakukan masih juga bersifar spekulasi, namun mecederungan pendapatan mereka secara garis besar dapat diprediksi. Peran pembiayaan nonformal dari “bos” jelas sangat dominan pada nelayan di Muncar.

Pembiayaan Nonformal Nelayan Bitung

Sumber investasi untuk usaha penangkapan ikan di Bitung berasal terutama dari hasil usaha perorangan dan dari pemodal pengusaha. Sebagaimana terjadi di tempat-tempat lain, nelayan-nelayan yang cukup berhasil di Bitung pada saat ini mula-mula bemodalkan hasil usaha mereka sendiri dari penangkapan ikan yang mereka lakukan. Pada mulanya mereka menjadi nelayan buruh atau ABK. Sedikit demi sedikit mereka menysihkan hasil dari usaha mereka. Apabila sudah mempunyai sedikit modal, nelayan yang kreatif biasanya memanfaatkan modal yang terbatas tersebut, sebagai modal penyertaan untuk ikut pemilikan sarana tertentu dari perahu atau kapal nelayan. Bila sudah demikian, tahap awal dari tataran modilitas sosial dari nelayan buruh menjadi nelayan pemilik sarana penangkapan ikan sudah mereka tapaki (Masyhuri, 2014). Secara ekonomi, kemampuan mereka sedikit demi terus menguat, dan bila sudah demikian, mereka beranjak untuk membeli kapal atau perahu nelayan berukuran kecil. Nelayan kecil seperti ini di Bitung disebut nelayan *tibo-tibo*.⁸ Sejumlah nelayan *tibo-tibo* berhasil mengalami mobilitas social yang berkelanjutan yang pada akhirnya mereka menjadi nelayan yang sukses yang mapan ekonominya.

Selain usahanya sendiri, terdapat sejumlah nelayan yang keberhasilannya tercapai berkat hubungan baik dengan pengusaha pengolahan ikan. Sebenarnya mereka pada umumnya bukan berlatar belakang sebagai nelayan. Pada tahap-tahap awal, mereka umumnya pedagang ikan, sebagai penampung atau *langgan* bagi sejumlah *tibo-tibo*. Kedudukannya ini membawa mereka berhubungan dekat dengan pengusaha industri pengolahan ikan sebagai pemasok ikan. Bermodalkan hubungan baik yang terbangun antara mereka dan para pengusaha perikanan, sebenarnya akses kepada sumber permodalan telah terbuka luas untuk mereka. Para pengusaha yang telah menaruh kepercayaan kepada mereka memberikan modal berupa sarana penangkapan ikan, khususnya kapal nelayan. Sampai tahap ini, seorang yang pekerjaan utamanya sebagai pemasok ikan telah menjadi nelayan, sebagai pemilik kapal nelayan, meskipun kapal tersebut

⁸ Hasil wawancara dengan sejumlah nelayan Bitung.

merupakan kapal hutangan yang masih harus dilunasi pembayarannya. Setelah kapal-kapal nelayan yang dipercayakan kepada mereka terbayar lunas, mereka kemudian berstatus sebagai nelayan darat, yakni pedagang ikan yang memiliki kapal nelayan yang tidak pernah melaut.

Dengan demikian, perusahaan pengolahan ikan merupakan salah satu sumber pembiayaan nelayan Bitung. Dengan modal yang mereka tanamkan, jumlah kapal nelayan dan nelayan Bitung bertambah. Bila menggunakan istilah yang berlaku di kalangan nelayan Muncar, industri-industri pengolahan ikan di Bitung berstatus sebagai “bos”. Meskipun istilah “bos” kurang lazim dan kurang dikenal di kalangan nelayan Bitung, mereka paham pula maksud dan peran penting “bos” dalam perkembangan usaha penangkapan ikan Bitung. Istilah “bos” kadang-kadang terdengar pula disebutkan oleh nelayan setempat. Bisa dikatakan peran mereka sebagai sumber modal bagi nelayan Bitung untuk pengembangan usaha perikanan tangkap sangat dominan pula. Pada tataran empiris, peran pemodal dari para Pengusaha, khususnya industri pengolahan atau eksportir ikan lebih dominan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan yang lain.

Sebagaimana yang dilakukan oleh “bos” di Muncar, para pengusaha sektor perikanan di Bitung memeberikan kredit atau pinjaman modal kepada nelayan. Perbedaannya, bila “bos” di Muncar memberi modal kepada nelayan dalam bentuk kapal nelayan dengan pembayaran “angsuran sekaligus”, maka pemodal di Bitung memberi modal dalam bentuk kapal nelayan pula dengan pembelian secara angsuran sebagaimana pembayaran secara kredit pada umumnya. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, “angsuran sekaligus” dalam transaksi jual beli kapal nelayan antara “bos” dan nelayan Muncar, nelayan pembeli kapal tidak boleh membayar secara tunai pada waktu dilakukan transaksi. Mereka harus membayar secara keseluruhan setelah waktu tertentu yang tidak ditentukan. Sebagaimana yang telah diterangkan pula di atas, keuntungan “bos” didapat dari margin harga ikan yang mereka tampung dari nelayan. Di Bitung, nelayan dapat mengangsur kapan saja setiap saat memiliki uang dengan jumlah angsuran

yang telah disepakati bersama. Semakin cepat angsuran dilakukan, semakin cepat pula kapal nelayan terbayar lunas, dan dengan demikian, nelayan menjadi pemilik sepenuhnya atas sarana kapal penangkapan ikan tersebut.

Pola umum hubungan antara pemodal dan nelayan yang mudah dilihat dilapangan adalah pola hubungan antara pemasok ikan dan pengusaha industri pengolahan ikan. Kelangsungan operasional industri pengolahan ataupun eksportir ikan tergantung sepenuhnya dengan pemasok bahan baku ikan. Oleh karena itu, penjaminan akan kesinambungan pemasokan ikan ke perusahaan merupakan masalah krusial yang harus dijaga secara ketat. Dengan sendirinya, kerja sama antara pengusaha dan pemasok ikan seperti ini jelas sangat penting. Bukan merupakan hal yang aneh apabila industri-industri pengolahan ikan di Bitung memiliki dermaga-dermaga khusus untuk pendaratan ikan.

Di Bitung, setidaknya-tidaknya terdapat dua bentuk kerja sama dalam pengadaan ikan yang dapat diketemukan di lapangan. Bentuk pertama adalah kerja sama antara pengusaha atau industri pengolahan ikan dan industri penangkapan ikan asing. Jumlah kapal asing penangkap ikan melakukan kontrak kerja dalam waktu tertentu dengan industri pengolahan ikan yang ada. Kapal-kapal asing tersebut dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, dan menjual ikan hasil tangkapannya kepada perusahaan pengontrak. Seringkali bila waktu kontrak selesai, kontrak kerja tersebut diperpanjang. Bila tidak dan waktu kontrak selesai, kapal-kapal tersebut kembali ke negara mereka masing-masing. Tidak mengherankan bila setiap saat ada kapal-kapal nelayan asing berbendera Indonesia bersandar di pelabuhan perikanan Bitung. Pada waktu penelitian lapangan dilakukan, terdapat dua kapal asing dari Panama yang bersandar di pelabuhan perikanan Bitung. Kapal-kapal tersebut dalam persiapan pulang kembali ke Panama setelah berakhirnya kontrak kerja mereka dengan salah satu perusahaan perikanan yang ada di Bitung. Hanya saja, menurut beberapa “pengurus”, sering terjadi pula kapal-kapal asing tersebut tidak kembali ke Bitung, langsung pergi ke Negara

asal atau ke tempat lain dengan semua ikan hasil tangkapan mereka.⁹

Bentuk kerja sama kedua untuk menjamin kelangsungan pemasokan bahan baku industri pengolahan ikan adalah kerja sama dengan nelayan setempat, dengan cara mempekerjakan mereka sebagai ABK kapal nelayan milik perusahaan, atau memberi kredit dalam bentuk kapal nelayan dengan ketentuan penjualan ikan hasil tangkapan harus kepada perusahaan pemberi kapal. Melalui kredit kapal dari perusahaan ini jumlah kapal nelayan di Bitung semakin bertambah banyak. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, penerima kredit dari perusahaan pengolahan ikan seperti ini pada mulanya bukan nelayan yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain yang lazim di kalangan nelayan Jawa, mereka adalah nelayan juragan darat, yakni nelayan pemilik kapal yang tidak ikut melaut menangkap ikan. Hampir semua, atau sebagian besar nelayan pemilik *soma*, *lamboot*, dan kapal pancing yang ada di Bitung saat ini adalah nelayan pemasok ikan untuk salah satu industri pengolahan ikan yang ada di Bitung.

Berbeda dengan itu adalah nelayan *soma pajeko*. Mereka tidak mempunyai ikatan khusus dengan industri pengolahan ikan. Nelayan *soma pajeko* adalah nelayan-nelayan Bitung yang sebenarnya. Mereka menekuni pekerjaan sebagai nelayan dari awal, dari nelayan yang berstatus sebagai ABK dan menanak perlahan-lahan sebagai nelayan pemilik kapal. Mereka tidak terikat pada industri pengolahan ikan manapun, dan bebas menjual ikan hasil tangkapannya. Umumnya Nelayan *Soma pajeko* menjual ikan hasil tanggapannya di area TPI, meskipun TPI sendiri tidak melakukan lelang. Karena itulah, pada saat-saat pendaratan ikan, tidak saja dermaga-dermaga khusus milik perusahaan yang ramai dan dipenuhi ikan hasil tangkan, tetapi juga areal TPI. Ikan yang perjual-belian di TPI adalah ikan-ikan segar untuk pemenuhan permintaan konsumsi local.

Hasil wawancara tentang pengalaman seorang nelayan yang bernama Albert (bukan

⁹ “Pengurus” adalah orang atau seseorang yang mempunyai hubungan kerja sama dengan perusahaan penangkapan ikan, dengan tugas khusus mempersiapkan semua perbekalan melaut yang dibutuhkan oleh kapal, seperti kebutuhan solar, bahan makanan untuk konsumsi sehari-hari, dan sebagainya.

nama sebenarnya) berikut akan memberi ilustrasi peran pembiayaan nonformal yang dimaksud.¹⁰ Albert pada saat ini berstatus sebagai nelayan pemilik berapa *lamboot* yang menangkap ikan dengan jaring *purse seine*. Tangkapan utamanya adalah ikan cakalang, ikan tongkol, dan ikan palagis besar lainnya. Dia tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di areal TPI, tetapi langsung di dermaga salah satu industri pengolahan ikan. Pada awal, ia adalah nelayan ABK biasa, tetapi kemudian beralih pekerjaan sebagai pedagang ikan. Pada tahun 1991, ia menjadi salah satu pemasok ikan sebuah perusahaan, dan peran tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Setelah hubungan kerja sebagai pemasok ikan telah mapan, dia mendapat kepercayaan dari pemilik industri pengolahan ikan dan mendapatkan kredit berupa kapal penangkap ikan, yang harus ia bayar dengan angsuran. Bermula dari sinilah, Albert sekarang sudah memiliki berapa *lamboot*. Melalui proses seperti ini diantaranya, armada penangkapan ikan nelayan Bitung bertambah.

Secara umum dari aspek pembiayaan, usaha perikanan tangkap di Bitung sudah sampai pada tahap komersial. Meskipun usaha perikanan tangkap yang dilakukan masih juga bersifar spekulasi, namun mecederungan pendapatan mereka secara garis besar sudah dapat diprediksi. Tingkat perkembangan yang demikian menjadikan usaha perikanan tangkap di Bitung sudah sampai pada tataran yang *bankable* sifatnya. Sejumlah bank pada dasarnya sudah dapat mengucurkan kredit pada mereka, dengan ketentuan-ketentuan yang cocok dengan dinamika dari usaha perikanan tangkap yang mereka lakukan. Walaupun bagaimana, pembiayaan lembaga nonformal bisa dikatakan masih sangat dominan di kalangan nelayan Bitung. Pentingnya pembiayaan nonformal pada usaha perikanan tangkap di Bitung ini jelas akan tampak nyata pada tahap-tahap awal dari usaha perikanan tangkap seseorang.

KESIMPULAN

Sesuatu yang sulit dibantah adalah bahwa usaha penangkapan ikan laut sektor tradisional di Muncar dan di Bitung merupakan usaha padat

¹⁰ Wawancara dengan Bpk Jeffri, ketua HIPKEN (Himpunan Pengusaha Kecil Nelayan) Bitung.

modal. Sebagaimana usaha penangkapan ikan laut di tempat-tempat lainnya di Indonesia, akses nelayan Muncar dan Bitung kepada lembaga pembiayaan formal, seperti bank, juga sangat terbatas. Di kedua daerah ini, bank kurang berminat menyalurkan kreditnya kepada nelayan. Alasannya juga kurang lebih sama, pendapatan nelayan sulit untuk diprediksi, sehingga dikhawatirkan nelayan akan mengalami kesulitan ketika mereka harus mengangsur secara teratur kredit yang mereka terima. Modal investasi bagi nelayan di daerah Muncar dan Bitung bagaimanapun juga masih merupakan kendala dalam pengembangan usaha perikanan tangkap. Sebagai akibatnya, peran pembiayaan nonformal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank sangat dominan. Singkatnya, pola umum yang terjadi pada usaha perikanan tangkap sektor tradisional di Muncar dan di Bitung adalah pola pembiayaan nonformal. Kasus pembiayaan usaha perikanan tangkap di ke dua daerah ini dengan demikian merupakan ferifikasi pola pembiayaan usaha perikanan tangkap umumnya yang ada di Indonesia.

“Bos” merupakan institusi penting sebagai sumber pembiayaan usaha perikanan tangkapan di Muncar dan Bitung. Meskipun di kalangan nelayan Bitung kurang dikenal sebutan “Bos”, peran pemilik industri-industri pengolahan ikan sebagai sumber pembiayaan untuk usaha penangkapan ikan di daerah ini sangat strategis sebagaimana peran “Bos” di kalangan nelayan penangkap ikan di Muncar. Sebagai sumber pembiayaan, kedua “Bos” tersebut menanamkan modalnya untuk usaha perikanan tangkap secara in natura. Mereka mengkreditkan kapal-kapal untuk penangkapan ikan kepada nelayan dengan cara angsuran. Bedanya, apabila “Bos” di Muncar mengkreditkan kapal nelayan dengan cara “angsuran sekaligus”, “Bos” di Bitung mengkreditkan kapal nelayan dengan cara angsuran sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat lain pada umumnya. Apabila nelayan Bitung dapat setiap saat mengangsur hutang mereka ketika mereka mampu melakukannya, di nelayan di Muncar tidak dapat berbuat yang demikian. Mereka harus menabung atau menyimpan sendiri sedikit demi sedikit dari kelebihan hasil tangkapan mereka, dan baru

diperbolehkan membayar kredit mereka setelah uang yang mereka kumpulkan mencukupi untuk membayar dengan lunas sekaligus harga kapal yang mereka kredit.

“Bos” di Muncar tampaknya berspekulasi dengan kemampuan menabung nelayan. Semakin tertunda nelayan membayar harga kapal yang mereka terima, semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh “Bos”. Selama kapal belum terbayar lunas, selama itu pula nelayan harus menjual ikan hasil tangkapan mereka kepada dan dengan harga yang ditentukan oleh “Bos”. Selain itu, “Bos” dapat tetap mengikat nelayan untuk menjual ikan kepadanya. Apabila kapal telah terbayar lunas, nelayan Muncar bebas menjual hasil ikan tangkapan mereka kepada siapa saja, nelayan Bitung tidak dapat berbuat demikian. Meskipun kapal yang dioperasikannya telah terbayar lunas, mereka tetap terikat kepada “Bos”, mengingat pasar ikan yang berkembang di tempat ini bersifat oligopsoni.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, C. 1988. “The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia”, *Indonesia*, 46, 1988: 25 – 38.
- “BRI Beri Kemudahan Akses Kredit”. 2012. *Akuamina: Inovasi dan Bisnis Perikanan*, Edisi 44, Tahun II, 1 -15 September.
- Bucher, J.G. 2004. *The Closing of the Frontier: A History of Marine Fisheries of Southeast Asia c 1850 – 2000*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Butcher J. G and H. Dick (ed.). 1993. *The Rise and Fall of Revenue Farming. Business Elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia*. New York, Martin’s Press.
- Dirjen Perikanan. 1997. “Kebijakan Nasional di Bidang Perikanan”. Makalah belum diterbitkan, disajikan pada seminar *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Jakarta 7 Agustus 1997.
- Elfindri, 2002. *Ekonomi “Patron–Klien”: Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*. Padang, Universitas Andalas Press.
- Imron, M. 1998. “Peran “Bos” dan Dampak Social Ekonomi Nelayan Rinca”, *Masyarakat Indonesia*, vol. XXIII, no.2.
- Karim, A.A. 2001. *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- Masyhuri, 1996. *Menyisir pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850 – 1940*, Yogyakarta. Yayasan Pustaka Nusantara dan KITLV Perwakilan Jakarta.
- Masyhuri, 2014. “Pembiayaan Nelayan dan Mobilitas Sosial Nelayan”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 16, no. 1.
- Masyhuri, 2013^A. “Lembaga Keuangan Informal dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap” dalam M. Nadjib, (ed). *Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*. Jakarta. LIPI Press.
- Masyhuri, 2013^B. “Ekonomi Syari’ah Dalam Etika Pemerataan Resiko”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 21, NO. 2.
- Nadjib, M. (ed). 2013. *Optimalisasi Pemantauan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*. Jakarta. LIPI Press.
- Thoha, M. (ed). 2013. *Studi Model Lembaga Pembiayaan Usaha Rakyat Pada Sub Sektor Perikanan Tangkap*. Jakarta. Gading Inti Prima.